

Studi Evaluasi Pelaksanaan Dan Kelembagaan Pelaksana Program Bengkulu Regional Development Project (BRDP)

Nusril
M.Mustopa Romdhon
Indra Cahyadinata

Staff Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fak. Pertanian UNIB

Abstract

This research aims to explores level of success, constraints and benefits of BRDP on rural poor community. Qualitative methods which were based on prepare data or information as parts of flexible methods was used. The results showed that BRDPs implemetation has runned well. These was indicated by indicated the readiness and completed, range from province to village levels as well in infrastructure and institutional and beneficiaries. The success of implemented on village level instutitonal was supported by UPKD as leader on productive economic activities .These have UPKDs completed administration equipments, and the service product had competitive advantages comparing to others service product. The continuity of the activities post project could be well quarantee since these problems both normative and outcome real aspects were minimized. This induces improving on net working systems among UPKD, completing the financial-budget systems based on norms, and optimalities of Financial Assistant roles in village.

Key words : BRDP , evaluation,normative, outcome

PENDAHULUAN

Tingginya angka kemiskinan, serta luas sebaran wilayah miskin di Propinsi Bengkulu yang ditandai oleh jumlah masyarakat miskin di Bengkulu mencapai 54 % atau 126.000 kepala keluarga (KK) dari 248.000 KK ¹. Dewasa ini upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan perekonomian pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah melalui proyek BRDP Bengkulu. Program BRDP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/pusat berkerjasama dengan Bank Dunia telah dilaksanakan selama 4 tahun di tiga kabupaten secara total mencapai 220 desa. Sasaran yang ingin dicapai melalui berbagai aktivitas yang dalam proyek ini antara lain 1) terciptanya sumber pendapatan bagi penduduk miskin di desa melalui usaha-usaha penciptaan lapangan kerja kompetitif, 2) berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan, dan 3) meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan melalui kegiatan peningkatan pendapatan (Anonim, 2002; 2003)

¹ Sumber : Harian Umum Rakyat Bengkulu. Hal 7. Kolom Prestasi dan Komunikasi , Jumat 14 Maret 2003

Sejauh ini aktivitas –aktivitas yang dijalankan proyek BRDP telah mencapai perkembangan dan keberhasilan dalam mencapai target serta sasaran tersebut antara lain adalah perluasan jangkauan aktivitas proyek melalui peningkatan jumlah desa binaan yang secara terbatas merupakan indikasi perkembangan aktivitas proyek ke arah keberhasilan pencapaian target dan sasaran. Namun keberhasilan yang telah dicapai tidak lepas dari hambatan dan permasalahan yang secara signifikan dapat mempengaruhi proses pencapaian target dan sasaran tersebut. Hambatan dan permasalahan antara lain kekeliruan serta kegagalan dalam proses penentuan dan penetapan kriteria target dan sasaran, indikator-indikator tingkat kegagalan (*very satifactory*) dan keberhasilan (*unsatifactory*) aktivitas, dampak negati bagi desa-desa lain yang sebenarnya layak untuk ikut serta dalam proyek tersebut. Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi evaluasi terhadap pelaksanaan dan kelembagaan pelaksana program

KERANGKA TEORITIS

Program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari paradigma pembangunan untuk rakyat dan bukan sama sekali pembangunan untuk aparat, apalagi dipandang sebagai proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah semata. Oleh karena itu program tersebut harus dipandang dan dilaksanakan oleh masyarakat dan dilestarikan serta dinikmati oleh masyarakat sendiri. Disisi lain kelompok masyarakat yang mampu harus membantu kelompok masyarakat yang menderita. Agar program tersebut berjalan baik dan tepat sasaran maka perlu dipantau dan dievaluasi (Sumodinigrat, 1999). Evaluasi terhadap proyek-proyek pemerintah baik yang didanai melalui keuangan pemerintah maupun lembaga donor seperti Bank dunia, bertujuan memberikan gambaran kinerja (*performance*) dari suatu proyek secara keseluruhan. Evaluasi (Sukiyono dan Musriyadi, 2004) merupakan aktivitas internal dan eksternal manajemen untuk menilai kepatutan dari rancangan program dan metode implementasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, menilai hasil yang diinginkan maupun tidak dari suatu program, serta menilai factor yang mempengaruhi tingkat dan distrbusi yang dihasilkan. Augusta (2003), Wahyuni, Nuraini, dan Yuliaty (2003) selama ini proyek-proyek pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah yang berjalan secara *top-down*, dapat dipastikan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap proyek dan program dilakukan secara *top-down*. Evaluasi yang dilaksanakan baik terhadap aturan normatif maupun hasil riil proyek hanya ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan administrasi saja, tapi jauh dari makna pemberdayaan (*empowerment*) itu sendiri.

Proyek BRDP sejauh pengamatan penulis merupakan aktifitas proyek pembangunan yang dijalankan melalui pola *mixed* (top-down dan bottom-up). Artinya evaluasi harus dijalankan melalui pola *mixed* pula agar diperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan, yang bersumber dari semua stakeholders yang terlibat pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Idealnya evaluasi yang dilakukan menurut Augusta (2003) harus mencakup dua aspek *normative* yang mencakup konsistensi logis antara tujuan dan latar belakang program, pemanfaat, lokasi, pendekatan dan prinsip pengelolaan, organisasi pelaksana, pemantauan, pelaporan, penyebaran informasi, sumberdana, alokasi dana, dan penyaluran dana. Sedangkan aspek *outcome* riil proyek mencakup proses social yaitu proses desentralisasi, partisipasi masyarakat, transparansi, swadaya dan kompetisi yang sehat, keluarga pemanfaat, kelompok, dan pertemuan desa, unsur pemerintah dan lembaga bentukan pemerintah, pendamping serta tahapan perencanaan kegiatan desa serta evaluasi konseptual yang memungkinkan perbaikan perencanaan dan peramalan program.

METODE PENDEKATAN STUDI

Studi evaluasi ini dilakukan dengan metode yang bersifat fleksibel dalam hal ini metode kualitatif yang berbasis pada ketersediaan informasi/data. Populasi studi merupakan desa-desa penerima proyek BRDP pada desa sasaran tahap I, tahap II, dan tahap III, yang terdiri dari 220 desa. Pengambilan sampel dalam studi ditentukan secara stratifikasi bertahap (Singarimbun, M dan Sofian E, 1989). Kriteria sampel dipilih berdasarkan. Berdasarkan ketiga kriteria karakteristik wilayah (desa), aspek variasi tipologi aktifitas proyek BRDP serta ukuran desa diambil sampel secara berimbang pada wilayah survei pilih secara purposive (sengaja). Sampel studi terdiri dari 8 desa setiap tahap dan 10 orang responden untuk setiap desa sehingga total sampel adalah 24 desa dan 240 responden. Studi ini dilakukan selama 3 bulan pada tahun 2003.

Informasi dan data yang dikumpulkan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*), *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi dokumen. Wawancara mendalam dan FGD dilakukan terhadap responden dan informan kunci, dengan menggunakan suatu pedoman pertanyaan sebagai pemandu arah wawancara. Studi dokumen pada dasarnya menghasilkan data berupa laporan-laporan, makalah-makalah, dan surat-surat resmi yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung bagi data hasil wawancara. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap hasil wawancara dan diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi evaluasi pelaksanaan Bengkulu *regional development project* (BRDP) terfokus pada evaluasi pelaksanaan dan kelembagaan pelaksana program. Aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan dan kelembagaan pelaksana program akan menjawab hambatan dan permasalahan yang secara signifikan dapat mempengaruhi proses pencapaian target dan sasaran tersebut sehingga diketahui sejauhmana tingkat keberhasilan, hambatan serta manfaat proyek BRDP terhadap masyarakat miskin pedesaan.

Sosialisasi Program

Berbagai pihak terlibat dalam sosialisasi keberadaan BRDP dan UPKD. Para Nasabah memperoleh informasi tentang keberadaan BRDP dan UPKD dari berbagai pihak tersebut. Data pada Tabel 1 memperlihatkan besarnya peran masing-masing pihak sebagai sumber informasi tentang keberadaan BRDP dan UPKD.

Tabel 1. Persentase Pihak-pihak yang Memberikan Informasi tentang Keberadaan BRDP dan UPKD

| No. | Uraian | Persentase(%) |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | Pengurus UPKD | 77 |
| 2. | Tetangga | 38 |
| 3. | Kepala Desa | 36 |
| 4. | PPL | 25 |
| 5. | POKJA | 21 |
| 6. | Fasilitator | 19 |
| 7. | Manajemen Proyek | 14 |

Sekitar 76 persen lebih nasabah memperoleh informasi dari pengurus UPKD, sekitar 37 persen memperoleh informasi dari tetangga, 35 persen memperoleh informasi dari kepala desa, 25 persen memperoleh informasi dari PPL, 21 persen memperoleh informasi dari Pokja, 19 persen memperoleh informasi dari fasilitator, dan 14 persen memperoleh informasi dari manajemen proyek. Data pada Tabel 2 ini memperlihatkan bahwa pengurus UPKD memiliki peran yang paling dominan sebagai sumber informasi tentang keberadaan BRDP dan UPKD, diikuti oleh tetangga, kepala desa, PPL, Pokja, Fasilitator, dan manajemen proyek.

Sedangkan untuk informasi Program Kegiatan Desa (PKD), pengurus juga pihak yang paling dominan perannya sebagai sumber informasi, diikuti secara berturut-turut oleh kepala

desa, fasilitator, tetangga, PPL, dan pokja. Besarnya persentase peran dari masing-masing pihak sebagai sumber informasi tentang kegiatan PKD disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Persentase Pihak-pihak yang Memberikan Informasi tentang Program Kegiatan Desa (PKD)

| No. | Uraian | Persentase (%) |
|-----|---------------|----------------|
| 1. | Pengurus UPKD | 54 |
| 2. | Kepala Desa | 47 |
| 3. | Fasilitator | 40 |
| 4. | Tetangga | 26 |
| 5. | PPL | 24 |
| 6. | POKJA | 17 |

Cara memperoleh informasi program BRDP/UPKD yang paling banyak dilakukan adalah dengan mengikuti rapat anggota, rembug desa, penyuluhan, dan membaca pengumuman. Besarnya peran dari masing-masing media sebagai sumber informasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Cara Memperoleh Informasi Program BRDP/UPKD

| No. | Uraian | Persentase (%) |
|-----|---------------------------------|----------------|
| 1. | Rapat Anggota dan Pengurus UPKD | 59 |
| 2. | Rembug Desa | 52 |
| 3. | Penyuluhan | 29 |
| 4. | Membaca papan pengumuman | 20 |

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa rapat anggota dan pengurus UPKD merupakan media yang paling dominan perannya sebagai sumber informasi, yakni sebesar 59 persen, diikuti secara berturut-turut oleh media rembug desa sebesar 52 persen, penyuluhan sebesar 29 persen, dan papan pengumuman sebesar 20 persen. Dengan demikian media yang paling efektif dalam penyampaian informasi adalah rapat anggota dan pengurus dan rembug desa. Rendahnya peran papan pengumuman menunjukkan masih rendahnya budaya membaca. Hal ini dapat disebabkan tingkat pendidikan nasabah yang relatif rendah sehingga hanya mampu menjadi penerima pasif (mendengar) dan kurang aktif (membaca/melihat pengumuman).

Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD)

Hasil studi pada UPKD diketahui bahwa sekitar 93 persen UPKD telah memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Dengan demikian UPKD sebagai lembaga keuangan di desa telah memiliki legalitas berdasarkan kesepakatan anggota UPKD itu sendiri. AD dan ART dalam jangka panjang sangat diperlukan agar UPKD dapat eksis dan

mengikat setiap elemen-elemen yang terkait baik pengurus maupun anggota. Kelengkapan kelembagaan lainnya seperti: buku tamu, kartu simpan pinjam, buku kas, buku DUM dan DUK serta buku agenda pencairan kredit telah dimiliki semua UPKD. Kelengkapan kelembagaan ini sangat menunjang kemajuan UPKD, apabila aturan-aturan kelembagaan telah dilaksanakan dengan baik maka akan terlihat transparansi pengurus dalam pengelolaan proyek ini. Sedangkan kelengkapan lain seperti: leaflet, booklet, spanduk belum dimiliki oleh semua UPKD yang ada, sehingga pensosialisasian Program Kegiatan Desa (PKD) belum dilakukan secara optimal. Selain itu hampir semua UPKD telah melakukan pertemuan dan rapat secara kontinu dan insidental yang bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UPKD maupun perencanaan UPKD kedepan. Pertemuan dan rapat ini memberikan peluang besar kepada UPKD untuk memecahkan permasalahan dan lebih meningkatkan eksistensi UPKD tersebut. Sekitar 80 persen UPKD telah membuat sanksi tertulis, yang berguna untuk mengurangi tunggakan anggota, namun sebagian besar UPKD belum menerapkan sanksi tersebut karena masih ada rasa kekeluargaan pengurus dalam pengelolaan UPKD.

Isian data keuangan UPKD memperlihatkan tingkat pemahaman yang masih beragam tentang standar akuntansi, beberapa kasus adalah masih ditemui angka neraca yang tidak seimbang antara aktiva dan pasiva, juga masih ditemui penempatan rekening yang berbeda-beda. Namun demikian, ketersediaan data keuangan pada seluruh UPKD merupakan suatu keunggulan komparatif lembaga UPKD dibanding lembaga keuangan mikro lainnya yang setingkat desa, dan merupakan potensi keunggulan kompetitif lembaga UPKD nantinya.

Berdasarkan data keuangan dari UPKD yang disurvei diperoleh beberapa indikator dan kondisi rata-rata keuangan UPKD secara keseluruhan. Data kondisi rata-rata keuangan UPKD menunjukkan bahwa piutang rata-rata kepada anggota merupakan rekening aktiva yang paling dominan yakni sekitar 73 persen, diikuti oleh rekening bank, kas, dan barang-barang inventaris. Komposisi aktiva yang demikian mencerminkan masih belum berkembangnya struktur aktiva. Selanjutnya dominasi piutang pada struktur aktiva UPKD dapat dipahami karena kegiatan utama UPKD adalah peminjaman dana BRDP kepada masyarakat. Sementara dana BRDP merupakan rekening passiva yang paling dominan yakni sekitar 89 persen, diikuti oleh SHU sekitar 4 persen, simpanan anggota sekitar 2 persen, dana cadangan, tabungan, dan saham yang masing-masingnya di bawah satu persen. Proporsi passiva yang demikian menggambarkan masih

lemahnya kemampuan pemupukan dana oleh masyarakat dan sekaligus merupakan indikasi masih rendahnya keswadayaan masyarakat.

Data keuangan memperlihatkan jumlah serapan dana BRDP pada UPKD berkisar dari Rp.24,750,000 hingga Rp.200,000,000, dengan rata-rata sebesar Rp.102,685,588. Jumlah serapan minimal Rp.24,750,000 merupakan pencairan dana tahap awal, ini artinya UPKD tersebut baru sekali mengajukan pencairan dana. Sementara jumlah serapan sebesar Rp 200.000.000.- merupakan jumlah plafon dana maksimal yang bisa diserap. Sementara nilai rata-rata serapan dana memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, kemampuan UPKD menyerap dana BRDP baru sekitar 50 persen lebih. UPKD yang jumlah serapan dananya kecil ini terkendala pada tunggakan nasabah. Sementara tingkat pengembalian pinjaman oleh nasabah menjadi satu indikator keberhasilan sekaligus syarat pengajuan pencairan dana tahap berikutnya. Dalam hal kondisi UPKD seperti ini harus dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada nasabah dan masyarakat dalam hal pemahaman yang benar terhadap dana pinjaman.

UPKD telah mendesain pinjaman atau kredit kepada anggota atau nasabah dengan menetapkan plafon minimal dan maksimal kredit yang dapat diajukan. Rata-rata plafon kredit minimal yang dibiayai oleh UPKD adalah sebesar Rp.271.429 sedangkan rata-rata plafon kredit maksimal yang dibiayai sebesar Rp.2.066.667. Jangka waktu pengajuan proposal hingga diverifikasi berkisar antara 1 minggu sampai dengan 1 bulan, sedangkan jangka waktu proposal setelah diverifikasi hingga pencairan berkisar antara 3 hari sampai 1 bulan, beberapa UPKD tidak menetapkan batas waktu, karena sangat tergantung dengan keadaan keuangan UPKD dan jaminan dalam pengembalian. Dalam pengembalian semua UPKD tidak memberikan masa tenggang, artinya apabila pada bulan tertentu meminjam maka pada bulan berikutnya nasabah diharuskan membayar cicilan pinjamannya.

Cara pencicilan pinjaman, UPKD menerapkan sistem bunga pinjaman dan pengembaliannya setiap bulanan, hal ini dilakukan untuk mempercepat perputaran keuangan UPKD. Namun cara pencicilan pinjaman per bulan ini menjadi kendala karena beragamnya usaha yang dilakukan nasabah seperti: dagang, industri rumah tangga, jasa dan usahatani palawija, peternakan, perkebunan dan perikanan. Untuk jenis usahatani tersebut baru bisa menghasilkan secara musiman (≥ 3 bulan). Jenis usaha nasabah yang beraneka ragam harus bisa menjadi pertimbangan pengambil kebijakan dalam menetapkan cara pencicilan pinjaman menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan anggota. Dengan cara pengembalian

setiap bulan, maka jangka waktu pelunasan pinjaman UPKD biasanya menetapkan 6 bulan hingga 12 bulan dengan tingkat bunga tertentu.

Secara umum dalam menyeleksi proposal-proposal nasabah, UPKD telah menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu antara lain:

a. Aspek Nasabah:

Mempunyai usaha, punya keinginan untuk maju, tinggal di desa setempat, foto copy KTP, pas foto, watak, kejujuran, kekuatan berusaha, kejujuran dan lain-lain.

b. Aspek Usaha:

Usaha yang dikelola nasabah merupakan usaha tetap nasabah dan mempunyai prospek baik untuk dikembangkan lebih lanjut.

c. Aspek Jaminan

Sebagai agunan/jaminan kredit dapat berupa surat-surat berharga seperti: sertifikat tanah, surat keterangan kepemilikan tanah (SKT), BPKB motor/mobil, alat-alat elektronik, dan surat-surat berharga lainnya dan nilainya minimal sama dengan jumlah pinjaman yang diajukan nasabah.

d. Domisili

Setiap nasabah merupakan warga desa di wilayah kerja UPKD dan memiliki KTP, tinggal di desa setempat. Sedang dasar penetapan plafon pinjaman adalah hasil verifikasi terhadap kelayakan usaha yang diajukan, jenis usahanya, karakter calon nasabah, penilaian terhadap keadaan usaha sekarang.

Berdasarkan hasil studi pada UPKD diperoleh data rata-rata jumlah anggota UPKD adalah 95 orang laki-laki dan 30 orang perempuan, sehingga rata-rata anggota secara total adalah berjumlah 125 orang. Berikut disajikan tabel jumlah anggota UPKD. Sedangkan jumlah rata-rata nasabah UPKD adalah berjumlah 125 orang.

Karakteristik nasabah berdasarkan jenis usaha yang dilakukan adalah sekitar 69 persen nasabah bergerak dibidang usahatani yang terdiri atas: usahatani palawija, mina padi, ternak unggas, sayuran, kopi, nilam, karet, cokelat, padi sawah, sawit, perikanan. Sekitar 19 persen nasabah melakukan usaha dagang yang meliputi warung/kios, dagang hasil bumi dan depot kayu. Sekitar 8 persen nasabah melakukan usaha dibidang industri rumah tangga yang terdiri atas: gula

aren, batu bata, tahu/tempe, kerupuk dan meubler, dan 4 persen jasa. Proporsi nasabah berdasarkan jenis usaha disajikan dalam grafik 1 berikut ini.

Kendala yang Dihadapi Pengurus UPKD

Berbagai kendala dan hambatan dihadapi oleh pengurus UPKD dalam menjalankan roda organisasi, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PKD. Secara umum kendala utama yang dirasakan adalah masalah tunggakan kredit. Hal ini berakibat pada lambatnya perputaran dana dalam masyarakat itu sendiri, sehingga dana yang ada relatif sulit berkembang. Kendala-kendala yang ada tersebut telah dilakukan berbagai upaya oleh pengurus baik pendekatan pribadi untuk melakukan penagihan maupun memberikan penjelasan kepada nasabah tentang sifat pinjaman bukan hibah murni pemerintah, tetapi merupakan dana pinjaman yang harus dibayar.

Berbagai kendala dan solusi yang dihadapi oleh pengurus UPKD baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PKD terdapat dalam tabel 6 berikut ini. Frekuensi masalah yang paling sering diajukan adalah masalah tunggakan pinjaman, diikuti oleh pemahaman masyarakat terhadap UPKD, hubungan pengurus dengan aparat desa, dan pihak lainnya, keragaman pendapat, dan kekurangan modal untuk digulirkan.

Tabel 6. Kendala yang dihadapi dan Solusi yang di kemukakan oleh Pengurus UPKD

| No | Kendala Yang Dihadapi | Solusi |
|----|---|---|
| 1 | <p>Tunggakan anggota</p> <p>Disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya anggapan bahwa dana adalah cuma-cuma • Nasabah terpengaruh oleh nasabah desa lain yang pengembalian pinjamannya macet • Kurang aktifnya pokja sehingga pengurus agak kewalahan • Adanya anggapan pengurus UPKD kurang serius <p>Berakibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tertunda pemberian pinjaman kepada nasabah yang lancar pengembaliannya • Perguliran dana menjadi macet. | <ul style="list-style-type: none"> • Peringatan secara lisan, ditagih dengan surat tagihan • Ditagih setelah panen • Mengangsur sesuai kemampuan anggota • Penyelesaian oleh kades, perlu penjelasan/penyuluhan POKJA • Mempertegas aturan (tindakan) • Diadakan rapat anggota untuk membahas cara pengembalian kredit • Hukum adat (kepala kaum), kalau tiga bulan nunggak dibuat kesepakatan untuk tidak dilaksanakan • Pengurus terus memberikan pengertian kepada nasabah bahwa pinjaman itu harus dikembalikan dan dibantu fasilitator dan PPL |
| 2 | Masyarakat belum mengerti tentang UPKD | Pendekatan secara pribadi |

| | | |
|---|--|---|
| 3 | Hubungan pengurus UPKD dengan aparat desa & BPD yang tidak jelas | Merencanakan rembug desa |
| 4 | Beragam pendapat | Bermusyawarah mufakat |
| 5 | Perguliran dana yang masih kekurangan modal | Pengurus UPKD/POKJA akan mengajukan SP2D yang ketiga secepatnya |

Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik.

Berdasarkan hasil diskusi mendalam diperoleh data pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan kasus pada beberapa desa yang melakukannya. Pembangunan sarana dan prasarana fisik pada kasus beberapa desa memperlihatkan keamatan sarana dan prasarana yang dibangun dengan potensi sumberdaya yang tersedia, yakni sektor pertanian. Sarana dan prasarana fisik yang dibangun pada kasus desa Air Kopras, Garut, Sukabumi di kabupaten Rejang Lebong, serta desa Pasar Baru Pelokan, dan Air Dikit di kabupaten Bengkulu Utara adalah berupa jalan, jembatan gantung, gorong-gorong, pelapis siring saluran irigasi, dan penambahan pintu pembagi air. Bentuk pemanfaatan dari sarana dan prasarana yang dibangun tersebut adalah peningkatan akses ke lahan usahatani dan kelancaran irigasi.

Hasil studi menunjukkan volume atau nilai pemanfaatan sarana dan prasarana fisik cukup signifikan bagi perekonomian desa. Pembangunan Jalan dan jembatan gantung di desa Air Kopras, kabupaten Rejang Lebong, memberikan manfaat dalam pengangkutan hasil-hasil pertanian berupa Karet sekitar 8 ton per bulan, Kopi sekitar 10 ton per bulan, serta menghubungkan lahan usahatani Nilam sekitar 100 hektar dengan tempat domisili penduduk. Dalam hal ini terjadi penghematan biaya angkut Karet dan Kopi sekitar Rp 1, 8 juta per bulan.

Demikian pula pembangunan jalan dan gorong-gorong di desa Pasar Baru Pelokan, kabupaten Bengkulu Utara memberikan penghematan biaya angkut Gabah dan Sawit sekitar Rp 20 juta per musiman, pembangunan jalan di desa Air Dikit bermanfaat bagi kelancaran pengangkutan sekitar 25 ton Gabah dan 15 ton Sawit, pembangunan jembatan gantung dengan ukuran 70 m x 1,5 m memperlancar pengangkutan Gabah sekitar 500 karung per musim dari lahan ke tempat domisili penduduk, dan pelapisan siring serta penambahan pintu pembagi air di desa Sukabumi memperlancar dan memperluas jangkauan irigasi sehingga memberikan kenaikan hasil produksi Gabah sekitar 1 (satu) ton per dan pengembangan Usatani Padi Mina dengan nilai manfaat sebesar Rp1,35 juta hingga Rp 2 juta per musim. Dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana ini, keswadayaan masyarakat relatif kurang kecuali sebagai sumber tenaga kerja yang diupah.

Fasilitator (FA)

Fasilitator merupakan tenaga lapangan yang bertugas melakukan pendampingan terhadap UPKD dan masyarakat. Selain itu juga memberikan bimbingan terhadap administrasi dan kelembagaan UPKD, bersama-sama POKJA ikutserta dalam memverifikasi setiap proposal yang diajukan nasabah. Beberapa hal yang mengemuka adalah tentang keberadaan Fasilitator di desa dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat. Dalam hal ini keberadaan fasilitator di desa dan kegiatan pendampingan bagi pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat belum optimal di banding perannya pada pendampingan UPKD dan verifikasi proposal yang diajukan nasabah. Dalam sudut pandang fasilitator, rentang kendali yang luas erat kaitannya dengan belum optimalnya peran mereka pada kedua aspek di atas. Jangkauan yang dianggap memadai bila cakupan wilayah kerja tidak lebih dari tiga desa yang relatif berdekatan. Salah satu upaya yang baik dilakukan oleh fasilitator yang selama ini belum adalah mendorong usaha kelompok.

Pihak-pihak yang Berkepentingan (*Stakeholders*)

Berbagai pihak-pihak yang berkepentingan telah memberikan masukan/keterlibatan terhadap UPKD. Masukan yang pernah umumnya berasal dari Manajemen proyek, aparat dan badan perwakilan desa, tokoh-tokoh informal ditingkat desa, fasilitator, PPL, dan aparat kecamatan, dan beberapa dinas teknis seperti Dinas Kimpraswil dan Dinas Pertanian kabupaten. Masukan-masukan tersebut berkaitan dengan hal manajemen dan administrasi UPKD, penyelesaian tunggakan kredit anggota, penerapan hukum adat, dan dorongan/ motivasi. Pengurus UPKD mengharapkan pula masukan/ keterlibatan pihak yang selama ini belum memberikan perhatian penuh terhadap UPKD maupun belum pernah terlibat tetapi seharusnya terlibat, antara lain DPRD. Diharapkan mereka dapat merancang perda atau pengawasan terutama untuk pasca proyek. Selanjutnya, dalam beberapa kasus mengemuka pula harapan dari pengurus UPKD kepada manajemen proyek agar pihak manajemen proyek dapat mempertimbangkan pemberian insentif berupa honor tetap bulanan kepada pengurus UPKD. Hal ini mengingat pekerjaan pengurus cukup menyita waktu dan mereka berhadapan dengan masyarakat banyak yang tidak semuanya memahami keberadaan UPKD itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil studi yang telah dipaparkan memberikan sejumlah kesimpulan sebagai berikut pelaksanaan program BRDP telah berjalan secara baik yang diindikasikan oleh

1. kesiapan dan kelengkapan infrastruktur serta kelembagaan pelaksana mulai dari tingkat propinsi, kabupaten sampai desa, serta masyarakat peserta program.
2. Khusus kelembagaan pelaksana di tingkat desa keberhasilan ini didukung oleh 1) UPKD sebagai ujung tombak aktifitas perekonomian produktif telah memiliki alat kelengkapan administrasi yang memadai, 2) produk jasa UPKD berupa pinjaman telah memiliki daya saing dinatara sumber pendanaan yang dapat diakses masyarakat setempat (bunga murah dan administrasi sederhana).

Saran

Jaminan keberlanjutan kegiatan pasca fasilitasi BRDP dapat berjalan secara baik jika persoalan-persoalan mencakup aspek normative dan *outcome* rill mampu diminimalisasi. Kaitannya dengan hal tersebut, maka hasil studi menunjukkan perlunya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan belum terbangunnya jaringan antar UPKD dalam distribusi informasi harga dan pemasaran hasil, penguasaan pembukuan relatif lemah, keberadaan FA di desa dan perannya belum optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2002. *Buku Kerja Bengkulu Regional Development Project (BRDP)* Bengkulu Utara.
- Anonim. 2003.*Studi Evaluasi Dan Pengembangan Bengkulu Regional Development Project (BRDP)* Propinsi Bengkulu..BAPPEDA Propinsi Bengkulu.
- Augusta, I.2000. Asumsi-asumsi Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Indonesia .*Mimbar SOSEK* 13 (1) :19 – 28 April 2000.
- Augusta, I.2003. Metode Evaluasi Program Pemberdayaan (Evaluation Methods on Empowerment Programe). *Mimbar SOSEK* 16 (1): 93 – 116, April 2003.
- Singarimbun, M dan Sofian E.1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES Jakarta.
- Sukiyono, K Musriyadi Nabiu, 2004. Metode Monitoring dan Evaluasi : Diskusi. *Jurnal Agrisepe* 2 (2) : 157 – 163, Maret 2004.
- Sumodinigrat, G.1999. Penanggulangan Krisis Harus Memihak Rakyat. *Majalah Triwulanan Perencanaan Pembangunan* 16 Juni/Juli 1999. BAPPENAS. Jakarta.
- TIM Teraju. 2003.*Studi Evaluasi Dan Pengembangan Bengkulu Regional Development Project (BRDP)* Propinsi Bengkulu. Kerjasama LSM TERAJU dengan BAPPEDA Propinsi Bengkulu.

- Wahyuni, S.E, Nuraini P, dan Yuliaty R.2003. Kajian Tentang Program-Program Pelayanan Lanjut Usia di Pedesaan di Indonesia. *Mimbar SOSEK* 16 (1) : 1 – 20, April 2003 .
- Yuliarso,M.Z dan Indra C.2003. Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat Pedesaan terhadap Kegiatan Bengkulu Regional Development Project (BRDP). *Jurnal Agrisep* 1 (2), : 137 – 143, Maret 2003.